

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah, tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah, dan SiLPA terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Daerah. Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah dalam penelitian ini adalah proporsi antara PAD dan DAU. Untuk tingkat kemandirian dalam mengelola potensi daerah ukuran yang digunakan yaitu proporsi antara PAD dan DBH. SiLPA dalam penelitian ini tidak ada ukurannya, karena didapat langsung dari pos penerimaan pembiayaan. Sedangkan tingkat kinerja pelayanan publik daerah sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan proporsi Belanja Modal dan Belanja Daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang melaporkan realisasi APBD di DJPK dari tahun 2006-2012. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan fiskal (TKMKF) daerah dan tingkat kemandirian dalam mengelola potensi (TKMP) daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik (TKPP) daerah. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja pelayanan publik (TKPP).

Kata Kunci : Tingkat Kinerja Pelayanan Publik, PAD, DAU, DBH, SiLPA